

Bukan Indonesia Emas, Khilafah Sebabkan Indonesia Hancur 2045

written by Ahmad Khoiri



[Harakatuna.com](https://www.harakatuna.com) - Seiring dengan hawa panas Pemilu 2024, tersebar video yang isinya deklarasi para aktivis khilafah. Mereka menegaskan bahwa keadaan Indonesia hari ini sangat memprihatinkan. Korupsi tinggi, kemiskinan meluas, dan hukum carut-marut. Selain itu ekonomi timpang dan politik penuh oleh intrik ketidakadilan. Dalam video tersebut, mereka berkomitmen menciptakan Indonesia Emas 2045 melalui sistem Islam.

Sistem Islam apa yang dimaksud, dan siapa mereka yang dengan percaya diri mampu melawan arus global? Deklarasi semacam itu, sebenarnya, sudah terjadi berulang-ulang. Tesis mereka sama, yakni hendak mendekonstruksi sistem kenegaraan yang dianggap sekuler-kapitalisme. Bagi mereka, hanya khilafah yang bisa menciptakan Indonesia Emas 2045, karena di situlah korupsi dan ketidakadilan akan dibabat habis.

Perlu digarisbawahi, narasi Indonesia Emas 2045 telah menjadi narasi nasional termasuk dalam pergelaran Pemilu 2024. Para kandidat Capres-Cawapres diorientasikan untuk memiliki visi-misi menuju kesejahteraan Indonesia pada dua

dekade yang akan datang. Bisa dilihat, misalnya, bagaimana paslon 01, 02, dan 03 menyematkan visi-misi Indonesia Emas 2045 dalam pencapresan mereka.

Sebagai narasi nasional, tentu saja para aktivis khilafah tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan hal itu untuk agenda besar mereka, yaitu mendirikan negara Islam dengan sistem khilafah. Tidak tanggung-tanggung, mereka juga berkomitmen menjaga stabilitas sosial, hukum, ekonomi, politik, serta keagamaan Indonesia jika khilafah benar-benar berdiri. Muslim dan non-Muslim, menurut mereka, terjamin.

Kebenaran ihwal yang mereka katakan dalam deklarasi di video tersebut menarik dikaji. Untuk itu, tulisan ini berupaya untuk menemukan kebenaran yang mereka sembunyikan, sekaligus membuka tabir kebohongan mereka tentang khilafah itu sendiri. Baik itu dari kelompok HTI, simpatisannya, atau dari kelompok islamisme yang lain, yakni para pejuang Daulah, mereka dapat digeneralisasi sebagai “khilafahers”.

Khilafahers Itu Pembohong

Sebagaimana dalam argumentasi-argumentasi yang lalu, khilafah itu sama sekali lemah secara epistemologis. Jika rujukan historis para khilafahers dalam menarasikan khilafah adalah dinasti-dinasti Islam, sejak Umayyah hingga Utsmani, maka sangat jelas rujukan tersebut salah kaprah memahami sejarah. Islam, sejak dahulu, membebaskan sistem pemerintahan suatu negara dan hanya mengatur prinsip-prinsip utamanya.

Keadilan, umpamanya, itu diajarkan Islam. Kesetaraan, contoh lainnya, juga Nabi contohkan melalui Piagam Madinah. Tetapi Umayyah-Utsmani itu sistemnya pakai monarki, sehingga kekhilafahan Islam selama berabad-abad itu bersistamkan monarki. Apakah para khilafahers hari ini akan menerapkan monarki global, atau paling tidak, monarki Indonesia? Jelas naif. Yang wajib diperjuangkan itu prinsipnya, bukan sistem spesifiknya.

Karena itu, para khilafahers itu sejatinya pembohong. Mereka berbohong tentang definisi khilafah, contoh negara khilafah, dan agenda-agenda besar ala khilafahers jika khilafah itu berdiri. Sembilan pilar penegakan hukum yang mereka canangkan itu sudah *ter-cover* dalam konstitusi. Selain itu, empat pilar ekonomi Islam yang mereka suarakan, sebagaimana dalam video kemarin, itu juga nonsense. Mari dikaji satu per satu.

Pertama, agenda menghapus dominasi AS dan China melalui sistem moneter dinar-dirham. Para khilafahers jelas dusta dalam hal ini karena, faktanya, mengakhiri dominasi dua negara besar tersebut secara moneter tidak hanya tergantung pada pemakaian dinar dirham. Perekonomian global melibatkan faktor-faktor yang jauh lebih kompleks, termasuk kerja sama dan persaingan ekonomi antara negara-negara.

Kedua, agenda mematikan sektor moneter non-riil yang menjadikan uang sebagai komoditas. Ini juga tidak akan pernah terjadi. Mengapa? Sebab, mematikan sektor moneter non-riil akan menimbulkan dampak negatif pada ekonomi dan perdagangan global. Uang sebagai komoditas telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi modern. Jika khilafahers memaksakan kehendaknya, negara ini akan bangkrut sendiri.

Ketiga, agenda menata ulang sistem kepemilikan dengan pola sesuai syariat Islam. Inilah monopoli khilafahers dalam setiap agendanya. Konsep “sesuai syariat” dapat ditafsirkan secara berbeda, sesuai kelompok dan manhaj teologis setiap Muslim. Tidak semua orang setuju tentang tafsir eksklusif tentang syariat Islam. Akan ada resistansi dalam mengimplementasikan pola kepemilikan “sesuai syariat” tersebut.

Keempat, agenda menjalankan sistem ekonomi Islam yang adil, tanpa riba misalnya. Padahal, definisi keadilan ekonomi itu bisa bersifat subjektif, tergantung pada pandangan masing-masing Muslim. Implementasi sistem ekonomi Islam, secara luas, mungkin memerlukan konsensus dan pemahaman bersama tentang tafsir syariat itu sendiri. Di tengah pluralitas Muslim, apakah agenda ini mungkin? Khilafahers telah dusta.

Masa Depan Indonesia

Masa depan tanah air, menuju Indonesia Emas 2045, sama sekali tidak tergantung pada agenda-agenda bohong para khilafahers. Optimalisasi SDM dan SDA adalah tantangan umum yang mesti dicari jawabannya oleh pemerintah—siapa pun yang berkuasa nanti. Jadi, jika nanti ada video lagi dengan narasi utopis semacam itu, jelas mereka berdusta untuk kepentingan politik individu-kelompok, yakni HTI dan sejenisnya.

Alih-alih akan mencapai era keemasan, khilafah akan membuat Indonesia terpuruk secara ekonomi-politik dan akan menghancurkan eksistensi Indonesia

itu sendiri. Khilafah bukan solusi kesemrawutan politik, sekalipun hari ini perlu revolusi besar-besaran dalam bidang hukum dan politik. Maraknya korupsi dan ketidakadilan adalah masalah nasional yang harus dipecahkan secara demokratis, bukan dengan merombak sistem negara.

Marilah cerdas untuk menuju Indonesia Emas 2045 melalui agenda-agenda yang konstitusional. Khilafah dan khilafahers tidak lebih dari virus demokrasi, yakni kelompok anti-demokrasi yang memanfaatkan kebebasan demokratis untuk tujuan-tujuan destruktif dan konfrontatif mereka. Masa depan Indonesia di tahun 2045 ada di tangan pecinta tanah air dengan segala sistem yang ada, bukan di tangan para perombak negara.

Wallahu A'lam bi ash-Shawab...